

PERGESERAN STRUKTURAL SEKTOR INDUSTRI

*Oleh : Syafaruddin Alwi **

PENGANTAR

Perubahan struktur perekonomian yaitu perubahan atas perbandingan antara kegiatan perekonomian di sektor pertanian dan sektor industri (makro), diyakini menentukan tingkat kehidupan masyarakat yang bergerak di kedua sektor tersebut yang akhirnya akan mempengaruhi perkembangan kegiatan di sektor mikro (baca bisnis). Ini berarti, jika terjadi pergeseran dalam struktur perekonomian di tingkat makro, akan menyebabkan pergeseran struktur perekonomian di tingkat mikro. Pola bisnis akan berubah sejalan dengan perubahan struktur tersebut.

GBHN mengisyaratkan pergeseran struktur tersebut haruslah dalam posisi yang saling menunjang. Sebab, jika tidak, maka kehidupan ekonomi rakyat yang sebagian besar berada pada sektor pertanian akan semakin suram. Strategi Pembangunan kita harus tetap pada pengertian bahwa berkurangnya peran sektor pertanian terhadap produk domestik bruto (PDB) dibandingkan dengan peran sektor industri, berarti sektor di industri berkembang industri yang mampu mengolah hasil-hasil pertanian (produk primer), menjadi produk manufaktur. Oleh sebab itu pada tahap awal industrialisasi, subsektor industri ringan yaitu jenis industri yang menghasilkan barang kebutuhan pokok dan barang konsumsi tidak tahan lama, berkembang lebih dahulu

baru kemudian diikuti oleh perkembangan subsektor industri berat yang menghasilkan bahan baku, bahan penolong. Barang logam, barang modal atau mesin serta barang konsumsi tahan lama.

Indonesia telah meletakkan kebijaksanaan bahwa sektor industri harus berperan lebih besar terhadap peningkatan PDB dan terutama industri manufaktur merupakan produk andalan untuk menggantikan peran produk non-migas dalam meningkatkan PDB melalui ekspor. Perubahan struktural ini perlu diamati karena semakin berkembang sektor industri khususnya manufaktur pada skala menengah dan besar akan lebih rentan terhadap apa-apa yang terjadi pada perekonomian global karena pada skala ini produk manufaktur akan memasuki persaingan di pasar internasional sebagai konsekuensi dari pelaksanaan strategi yang berorientasi ekspor.

Alasan lain yang dapat dikemukakan adalah, fokus industri manufaktur sejalan dengan sasaran pembangunan ekonomi yaitu menempatkan sumbangan yang lebih besar sektor ini terhadap PDB dibandingkan dengan sektor-sektor pertanian, produk Migas dan sebagai andalan untuk mengurangi hutang luar negeri. Dengan demikian evaluasi kebijaksanaan di sektor industri menjadi penting artinya dalam mewujudkan prospek sektor ini di masa yang akan datang, khususnya pada akhir Pelita VI.

* Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia dan Direktur pada program Magister Management Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

PERUBAHAN STRUKTURAL

Perkembangan ekonomi kita dapat diamati dalam tiga periode yaitu, periode penjajahan sampai dengan kemerdekaan, periode Orde Lama (1945 -1965) dan periode Orde Baru 1966 - sekarang. Pada masa penjajahan terutama sampai dengan diproklamasikan kemerdekaan, struktur

Tabel 1. Laju Pertumbuhan dan Sumbangan Sektor Pertanian dan Industri terhadap PDB 1989-1991

Tahun	Laju Pertumbuhan		Sumbangan Pada PDB	
	Pertanian	Industri	Pertanian	Industri
1989	3,12 %	11,57 %	20,58 %	18,48 %
1990	2,51 %	12,80 %	21,52 %	20,32 %
1991	1,03 %	11,03 %	19,60 %	22,22 %

Sumber: Makalah Menteri Perindustrian RI, 1992.

kegiatan perekonomian kita dapat digambarkan sebagai berikut (Prawiroardjo, 1987):

1. Perusahaan ekspor impor, industri manufaktur, asuransi, perkapalan, dan perbankan. Semua jenis bisnis ini dikuasai Belanda.

2. Perusahaan Perdagangan Besar (whole Seller) dan Eceran. Usaha perdagangan besar ini umumnya dikuasai oleh Cina. Perusahaan-Perusahaan ini dioperasikan melalui perusahaan- perusahaan dagang Belanda, yang didistribusikan lewat kantor-kantor cabangnya di semua daerah kepada para pedagang Cina sebagai perantara.

3. Pedagang Eceran yang dijalankan oleh pedagang Cina dan Pribumi.

Pada masa itu, perdagangan terutama produk primer dengan dukungan sektor perbankan lebih maju dari sektor industri manufaktur. Pada masa ini pula dapat dikatakan perekonomian rakyat hanya menjadi fondasi bagi keuntungan Belanda dan Cina perantara. Kondisi ini sangat menentukan perkembangan perekonomian kita setelah kemerdekaan. Pada masa kemerdekaan khusus pada periode 1945-1965, perubahan yang menonjol pada perek-

onomian Indonesia pada awalnya adalah nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda termasuk nasionalisasi Bank-Bank yang mereka miliki. Tetapi tindakan ini kemudian tidak diikuti dengan pelaksanaan strategi pembangunan untuk menanggulangi ketimpangan dan ketidakseimbangan yang bersifat struktural seperti kesenjangan dalam pola pembagian kekayaan dan pendapatan antar golongan, antara daerah, antar lingkungan kota dan desa, ketidakseimbangan antara sumber daya produksi dan modal yang tersedia dsb.

Hakekat kebijaksanaan pembangunan menurut Sumitro (1985), tidak dapat tidak harus berkisar pada upaya untuk menanggulangi ketimpangan dan kesenjangan tersebut karena pem-

angunan ekonomi adalah suatu proses perubahan struktural. Kebijakan ekonomi masa Soekarno yang tercermin pada Ren-cana Pembangunan Semesta, dalam sistem Ekonomi Terpimpin, dibiayai dengan defisit-spending dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, mendorong perkonomian Indonesia ke arah hiperinflasi dengan tingkat inflasi 650% pada permulaan Orde Baru.

Pada Masa Orde Baru, Indonesia sejak Pelita I, telah mencanangkan pembangunan ekonomi yang bertujuan merubah struktur perekonomian dari perekonomian yang bertumpu pada pertanian, menjadi perkonomian yang bertumpu pada kekuatan industri. Salah satu ciri dari negara berkembang termasuk Indonesia adalah, kontribusi produk manufaktur. Industrialisasi di negara berkembang umumnya mendorong pertumbuhan sektor industri yang cepat disertai dengan perubahan struktur PDB dari sektor primer ke sektor produk manufaktur. Selama kurun waktu Pelita I sampai dengan Pelita V, sumbangan sektor pertanian rata-rata setahun terlihat semakin menurun yaitu dari 44,6% pada Pelita I menjadi 21,6% pada Pelita V (sampai tahun

1993). Sedangkan sektor industri manufaktur walaupun lebih rendah sumbang-annya rata-rata per tahun dibandingkan dengan sektor pertanian tetapi menunjukkan trend yang selalu meningkat yaitu dari 9,2% rata-rata pada Pelita I menjadi 16,9% pada Pelita V (ISEI, 1989). Jika dilihat perkembangan per tahun, sumbangan sektor industri terhadap PDB baru dapat mengungguli peran sektor pertanian pertama kali pada tahun 1991 yaitu 22,2%. dibandingkan dengan 19,6%. Lebih jelas perkembangan sejak tahun 1989 s/d 1991 dapat dilihat dari tabel berikut :

Untuk perkembangan industri ringan dan industri berat nampaknya sangat terkait dengan berbagai kebijaksanaan pemerintah dan kondisi perekonomian secara makro. Kebijakan substitusi impor yang dijalankan sebelum tahun 1985, telah mendorong perkembangan subsektor industri ringan lebih cepat daripada subsektor industri berat, sehingga terjadi diversifikasi pada sektor industri. SKB tiga menteri misalnya yang secara bertahap mengurangi ekspor kayu lapis, telah mendorong kenaikan nilai ekspor industri terutama value added share dari 9% pada tahun 1995 menjadi 11% pada tahun 1991 (data BPS). Mari Pangestu dkk (1993), mengklasifikasikan analisisnya mengenai diversifikasi di sektor industri dengan tiga periode, yaitu :

1. Periode Era Boom Minyak 1975-1980.

Pada periode ini ditandai dengan peran sub sektor industri ringan lebih besar (20,6%) dari pada peran sub sektor industri berat (10%) terhadap PDB.

2. Periode Penurunan Harga Minyak 1980-1985.

Dalam periode ini sumbangan sub sektor industri berat meningkat menjadi 27,6% (1980). Sedangkan industri ringan menjadi 46,8% (1985), dibandingkan dengan 18,6% (1980).

3. Periode Deregulasi dan Orientasi ekspor 1985-1989.

Pada periode ini, peran sub sektor industri berat justeru menurun menjadi 43,2%

dibanding dengan tahun 1985. Sedangkan sub sektor industri ringan menjadi 34,6% dibandingkan dengan tahun 1985. Pola ini jelas bertentangan dengan apa yang terjadi di negara-negara berkembang pada umumnya dimana peran sub sektor industri ringan pada akhirnya menurun dan peran sub sektor industri berat meningkat. Akan tetapi jika industri gas alam dimasukkan kedalam perhitungan industri ringan, maka konstribusi industri ini terutama pada periode 1975-1983 pada PDB menurun yaitu dari 57,6% pada tahun 1975, menjadi 49,1% pada tahun 1980 dan 47,5% tahun 1983. Gas alam cair mulai diproduksi di Indonesia pada tahun 1977 dan konstribusinya dalam struktur industri manufaktur adalah 18,8% (1980) dan 23,4% pada tahun 1983 (Arsyad Anwar, 1987).

Dimuka telah dikemukakan bahwa perubahan struktural merupakan keharusan dalam perekonomian yang diharapkan dapat mengurangi antara lain kesenjangan pendapatan dalam masyarakat, ketimpangan sumber daya produksi dan tersedianya modal. Manfaat terhadap tenaga kerja sebagai akibat perubahan struktural dalam sektor industri ini adanya peningkatan pertumbuhan tenaga kerja pada sektor manufaktur sebesar 13% rata-rata pertahun selama periode 1986- 1991. Peningkatan ini lebih dari satu setengah kali yang terjadi pada tahun 1980-1985 (rata-rata 8%). Peningkatan ini didukung oleh perkembangan produk andalan antara lain industri tekstil yang melonjak tajam dari 7,7% (1980-1985), menjadi 16,9% (1985-1991) dan produk lain yang pertumbuhannya besar seperti wood product (20,5%) dan miscellaneous items (34,2%). Ini berarti perubahan struktural itu mempunyai implikasi positif terhadap kesempatan kerja yang akan mengurangi kesenjangan pendapatan dalam masyarakat.

Secara keseluruhan kebijaksanaan pemerintah yang meletakkan dasar industri sebagai penggerak utama pembangunan terutama pada pelita IV dan V, dilihat dari

peran produk manufaktur yang lebih besar dibandingkan dengan peran produk migas telah tercapai. Tabel 2 menunjukkan posisi sumbangan ekspor non migas dibandingkan dengan produk migas (1989-1991).

Tabel 2. Ekspor Non Migas dan Migas 1989-1991.

Tahun	Total Ekspor	Ekspor Migas	Ekspor Non Migas	
			Industri	Lainnya
1989	22,15 %	8,60 %	11,03 %	2,60 %
1990	25,67 %	11,07 %	12,60 %	2,00 %
1991	29,19 %	10,89 %	15,30 %	2,95 %

Sumber: Dep. Perindustrian RI, 1992.

Sementara itu untuk kelompok sub sektor industri berat, didominasi oleh tiga kegiatan pengolahan yaitu minyak dan LNG, pupuk dan semen. Dari ketiga pengolahan ini, semen masih menjadi persoalan sehingga menimbulkan kelangkaan yang berlarut. pertumbuhan ekspor semen memang menurun sejak tahun 1990 sebagai akibat pelarangan ekspor oleh pemerintah, mengingat kebutuhan dalam negeri yang meningkat. Dalam kondisi yang terjadi akhir-akhir ini, investasi baru dalam industri semen sangat mendesak, disamping perlu melakukan perbaikan pada sistem distribusinya. Pada kelompok sub sektor berat ini jenis industri yang tumbuh dengan cepat terutama pada periode 1975-1980 adalah industri besi baja yaitu sebesar 98,7% per tahun. Kemudian diikuti antara lain oleh industri kaca (41,2%), mesin listrik (30,8%), keramik (29,7%) dan semen 27,7%. (Mari pangestu dkk, 1993).

PENUTUP.

Dari uraian di muka dapat disimpulkan bahwa, peran sektor industri secara keseluruhan dalam perkembangan perekonomian

masional sangat penting dan perubahan struktural pada sektor ini mempunyai implikasi positif antara lain terhadap pertumbuhan tenaga kerja dan nilai tambah ekspor. persoalan yang perlu diperhatikan adalah, karena kebijaksanaan pemerintah sangat menentukan perkembangan di sektor manufaktur, maka keterpaduan kebijaksanaan antar departemen

en atau lembaga lain yang terkait sangat diperlukan. Katakanlah, kasus pelarangan perluasan Indofood sebagai contoh telah menimbulkan perdebatan yang berlarut yang berakhir dengan dibolehkannya perkuasan investasi. Begitu pula dengan kasus subsidi gandum oleh Bulog yang dianggap

menguntungkan kelompok industri tertentu. Ekonomi-politik dari perkembangan industri mensyaratkan perlunya kebijaksanaan pendukung yang mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan sektor industri seperti dukungan kebijaksanaan fiskal, perbankan, informasi industri, kepabeanan dan tata niaga dan tata ruang wilayah industri.

Referensi :

Anwar Arsyad dkk (ed), Prospek Ekonomi Indonesia Dalam Jangka Pendek; Peluang Dan Tantangan Dalam Sektor Riil Dan Utilitas Pada dasa Warsa 1990-an, Penerbit Gramedia, 1993.

Departemen Perindustrian RI, Kebijakan Dan Perkembangan Pemangunan Industri Nasional, 1992.

Prawiroardjo Priasmoro, Perbankan Indonesia 40 tahun, Dalam Buku Teori Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan, Penerbit Gramedia, 1987.